



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu adanya rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2026 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 - 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selanjutnya disingkat TPB atau juga *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB / SDGs adalah dokumen rencana kerja di tingkat kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang telah selesai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/SDGs yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari perangkat daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; dan

- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan dari RAD TPB/SDGs meliputi 17 tujuan yang terbagi ke dalam 4 pilar utama, yaitu:

- a. pilar pembangunan sosial
 - tujuan 1 : tanpa kemiskinan
 - tujuan 2 : tanpa kelaparan
 - tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera
 - tujuan 4 : pendidikan berkualitas
 - tujuan 5 : kesetaraan gender
- b. pilar pembangunan ekonomi
 - tujuan 7 : energi bersih dan terjangkau
 - tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
 - tujuan 9 : industri, inovasi dan infrastruktur
 - tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan
 - tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan
- c. pilar pembangunan lingkungan
 - tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak
 - tujuan 11 : kota dan permukiman yang berkelanjutan
 - tujuan 12 : konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
 - tujuan 13 : penanganan perubahan iklim
 - tujuan 14 : ekosistem lautan
 - tujuan 15 : ekosistem daratan
- d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola
 - tujuan 16 : perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*;
- b. Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Pelaporan.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD TPB/SDGs Tahun 2022-2026.
- (2) RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk matrik.
- (3) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RAD TPB/SDGs digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB/SDGs, dan penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD, serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Implementasi, Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.

- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 19 Februari 2025

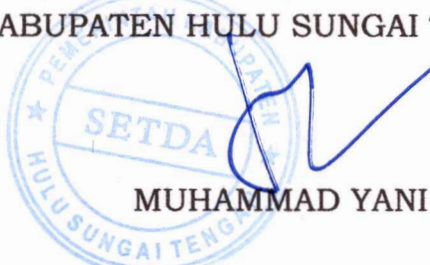
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

PILAR SOSIAL

1 TAMPILAN KEMISKINAN Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status					SKPD Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerita per hari.Amerita per hari.																				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK	
1.1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	1.06.05 PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial PKGB	Persen	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,43	0,4	Tercapai	Tercapai	Tercapai						
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.																				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK	
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.05 PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial PKGB	Persen	0,43	0,43	0,4	0,43	0,43	0,43	0,43	0,4	0,43	Tercapai	Tercapai	Tercapai					
1.2	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- PERLUNDUNGAN anak dari semua usia, DAN JAMINAN yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.06.05 PROGRAM PERLUNDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial PKGB	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai	Tercapai						DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK	

[illegible]

1.5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial PPPA	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai	Tercapai	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.a	Menjamin mobilitas yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan																		
1.a	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	X.XX.01 PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	persen	23,04	23,04	22,23	25,27	25,27	25,27	22,61	24,92	6,73			Membaik/ata n tercapai	Tercapai: n tercapai	DINAS KESEHATAN
1.a	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	Persen	26,57	20	20	20	20	20	26,57	23,42				Tercapai	Tercapai	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.a	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	persen	24,1	10	10	10	10	10	24,1	20,07				Tercapai	Tercapai	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.a	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial PPKB PPPA	Persen	0,23	0,23	0,24	0,32	0,32	0,32	0,23	0,24				Tercapai	Tercapai	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

PILAR SOSIAL

2 TANPA KELAPARAN Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status					SKPD Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																							
2.1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKPP	persen	5,3	5,9	4,1	3,6	3	3	5,9	4,1	3			Tercapai	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2.1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		BPS	persen	5	5	5	5	5	5	8,75	5,55				Membalik/ akan tercapai	Membalik/ akan tercapai					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																							
2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	21,1	18,4	16	12,5	12	11,5	10,2	10,2	9,5			Membalik/ akan tercapai	Membalik/ akan tercapai	Membalik/ akan tercapai				DINAS KESEHATAN	
2.2	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	7,4	7,5	7,3	7	6,6	6,1	1,04	0,4	9,1			Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus	Tercapai				DINAS KESEHATAN	
2.2	2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	20	20	20	20	20	20	20,5	16,6	18,02			Tercapai	Membalik/ akan tercapai	Membalik/ akan tercapai				DINAS KESEHATAN	
2.2	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPP	Skor	85,3	88,6	91,9	95,2	98,5	98,7	85,7	94,1				Tercapai	Tercapai					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2.2	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPP	Skor	85,3	88,6	91,9	95,2	98,5	98,7	85,7	94,1				Tercapai	Tercapai					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

2,3	Pada tahun 2030, menggendakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembang dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.																	
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKP	Ton	10,94	10,94	11,05	11,16	11,27	11,38	10,94	11,05	Tercapai	Tercapai			DINAS KERTAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DKP	Ton	8,13	8,13	8,21	8,29	8,37	8,46	8,12	8,2	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai			DINAS KERTAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Ton	22,96	22,96	23	23,2	23,35	23,45							DINAS PERTANIAN
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Ton	44,55	44,55	45	50	60	65							DINAS PERTANIAN
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Ton	2,2	2,21	2,23	2,25	2,28	2,29							DINAS PERTANIAN
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Ton	5,1	5,1	5,25	5,4	5,6	5,8							DINAS PERTANIAN
2,3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	%	94	94	95	96	97	98							DINAS PERTANIAN

PILAR SOSIAL

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SELAMTERA Menjamin kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status					SKPD Pelaksana		
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
3.1		Pada tahun 2030, mengurangi/ rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																						
3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	Per 100.000 kelahiran hidup	217	205	194	183	180	180	79	171	102,7			Membai/kan tercapai	Membai/kan akan tercapai	Membai/kan akan tercapai			DINAS KESEHATAN		
3.1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Tercapai	Tercapai	Tercapai			DINAS KESEHATAN		
3.2		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (kelahiran hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.																						
3.2	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	per 1000 KH	19,5	18,6	17,6	16	15	14	18,7	17,7	19,5			Tercapai	Tercapai	Membai/kan akan tercapai			DINAS KESEHATAN		
3.2	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	per 1000 KH	52	11,6	11	10	9	8	13,7	15,1	17,4			Tercapai	Tercapai	Tercapai			DINAS KESEHATAN		
3.3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit ber sumber air, serta penyakit menular lainnya.																						
3.3	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	per 100.000 penduduk	368	368	375	424	362	316	262	268,7	139,5			Membai/kan tercapai	Membai/kan akan tercapai	Membai/kan akan tercapai			DINAS KESEHATAN		
3.3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	permil	22	0	2000	2718	2718	2718	0,01	0,1	0,02			Tercapai	Perlu perhatian khusus	Membai/kan akan tercapai			DINAS KESEHATAN		

3,3	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	per 1000 penduduk	19	31	44	26	26	26	0,11	0,16	0,054				Tercapai	Tercapai	Membaik/ akan tercapai			DINAS KESEHATAN
3,3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	kab/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Tercapai	Tercapai	Tercapai			DINAS KESEHATAN
3,3	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Tercapai	Tercapai	Tercapai			DINAS KESEHATAN
3,3	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	23,8	25,5	13				Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus	Membaik/ akan tercapai			DINAS KESEHATAN
3,3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Tercapai	Tercapai	Tercapai			DINAS KESEHATAN
3,3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	7	8	4				Tercapai	Tercapai	Membaik/ akan tercapai			DINAS KESEHATAN
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																							
3,4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	75,1	79,3	38,7				Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai			DINAS KESEHATAN
3,4	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	0	0	21,8	21,8	0	0	17,7	34,1	2,7				Tercapai		Membaik/ akan tercapai			DINAS KESEHATAN

3,4	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persen	8,9	8,9	8,8	8,7	0	0	2,7	4,5	4,9		Membaik/a akan tercapai	Membaik/a akan tercapai		DINAS KESEHATAN
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.																		
3,5	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	orang	10500	10500	10500	11000	11500	####	0	0	0		Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus	Membaik/a akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																		
3,7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	75	75	75	75	75	75	75	76,9	80,7	0		Tercapai	Tercapai akan tercapai	DINAS KESEHATAN
3,7	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Sosial PPKB PPPA	Angka	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		Tercapai	Tercapai		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
3,7	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Sosial PPKB PPPA	Angka	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		Tercapai	Tercapai		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																		
3,8	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	96	97	98	99	99	99	95,3	99	98,8		Membaik/a akan tercapai	Tercapai akan tercapai		DINAS KESEHATAN

3,8	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	49	51	24		Membai/a akan tercapai	Membai/a akan tercapai	Membai/a akan tercapai			DINAS KESEHATAN
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.																					
3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur >=15 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	8,9	8,9	8,8	8,7	0	0	2,7	4,5	4,9		Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus	Membai/a akan tercapai			DINAS KESEHATAN	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration																					
3.b	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	40		Tercapai	Tercapai	Membai/a akan tercapai			DINAS KESEHATAN	
3.b	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1.02.02 PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas kesehatan	persen	93,6	90	100	100	100	100	24,6	95,6	95,3		Tercapai	Membai/a akan tercapai	Membai/a akan tercapai			DINAS KESEHATAN	

4.a	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial PPKB PPPA	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai	Tercapai			DINAS SOSIAL, PENGENDALUAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBEBAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.a	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	1.01.02 PROGRAM HST	Dinas Kab. HST	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Tercapai	Tercapai			DINAS PENDIDIKAN

PILAR SOSIAL

5 KESERAPAN GENDER Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status		SPD Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.2		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

PILAR LINGKUNGAN HIDUP

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status	SKPD Pelaksana					
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026									
6.1		Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.																							
6.1	6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	HST	Persen	79,22	79,22	81,5	80,34	80,94	81,44	76,42						Perlu perhatian khusus							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.3		Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan																							
6.3	6.3.1 (a)	Presentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DUPR	%	11,11	11,11	33,33	55,56	77,78	100	0	0					Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
6.3	6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kemen LHK	poi	50,25	50,25	50,35	50,41	50,63	51,14	59	57,5					Terpenuhi	Terpenuhi						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

PILAR EKONOMI

8 PEREKUBAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Ketersediaan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status		SKPD Pelaksana		
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
8.1		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.																			
8.1	8.1.1*	laju pertumbuhan PDB per kapita	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMP/SPTK	Persen	2,36	2,36	4	1,69	14,88	5,8	6,34	5,96	6			Tercapai	Perlu perhatian khusus	Tercapai		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.1	8.1.1(a)	PDB per kapita	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	BPS	Persen	29000000	29000000	30730000	31250000	35900000	37980000	30210000	32285000				Tercapai	Tercapai			DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1(a)	PDB per kapita	3.30.07 PROGRAM PENGUNJUAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	BPS	Rupiah	29000000	29000000	30730000	31250000	35900000	37980000	30210000	32285000				Tercapai	Tercapai			DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1(a)	PDB per kapita	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	BPS	Rupiah	29000000	29000000	30730000	31250000	35900000	37980000	30210000	32285000				Tercapai	Tercapai			DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1*	laju pertumbuhan PDB per kapita	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pengolahan Data BPS	Persen	2,36	2,36	4	1,69	14,88	5,8	2,36	5,97				Tercapai	Tercapai			DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1*	laju pertumbuhan PDB per kapita	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengolahan Data BPS	Persen	2,36	2,36	4	1,69	14,88	5,8	2,36	5,97				Tercapai	Tercapai			DINAS PERDAGANGAN
8.2																					
8.2	8.2.1*	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.																			
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMP/SPTK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	55			Tercapai	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMP/SPTK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	60			Tercapai	Membaik/ akan tercapai	Tercapai		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMTSP TK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	60					Tercapai	Membak/ akan tercapai	Tercapai					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMTSP TK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	60					Tercapai	Membak/ akan tercapai	Tercapai					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMTSP TK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	60					Tercapai	Membak/ akan tercapai	Tercapai					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMTSP TK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	60					Tercapai	Membak/ akan tercapai	Tercapai					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	2.18.06 PROGRAM PENGELAIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMTSP TK	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	60					Tercapai	Membak/ akan tercapai	Tercapai					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N	BPS	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Tercapai					SEKRETARIAT DAERAH	
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDG riil per orang bekerja per tahun.	2.09.02 PROGRAM PENGELAIAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Bappeltbang da	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,49	4,36	0,1						Tercapai	Tercapai					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWAANAN PANGAN	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN
8.2	8.2.1*	laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.25.04 PROGRAM PENGELUARAN BUDIDAYA	Bappeitbang	persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1	Tercapai	Tercapai				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN

8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.31.04 PROGRAM PENGELOAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN ENSPOR	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN
8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1						Tercapai	Membaik/ akan tercapai					DINAS PERDAGANGAN

8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLUNDUNGAN KONSUMEN	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1							DINAS PERDAGANGAN
8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,36	7,29	4,94	4,36	0,1							DINAS PERTANIAN
8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1							DINAS PERTANIAN
8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengolahan Data BPS	Persen	4,36	4,36	4	6,35	7,29	4,94	4,36	0,1							DINAS PERTANIAN
8.5	8.5.1*	Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	OPAP/PSPTK Rujukan		21000	16800,42	18207,96	18497,11	19236,99	20006,47	18750	18750	21000						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
8.5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	3.30.07 PROGRAM PENGUNJIAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	UMR Kalsel / Rujukan		16800	16800	18207	18497	19236	20006	18750	18750							DINAS PERDAGANGAN
8.9	8.9.1(a)	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disporpar orang	50	35	37	39	41	43	31	32	0							DINAS KEPENDAHWAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
8.9	8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disporpar orang	100000	100000	105000	105000	110000	110000	219597	232374								DINAS KEPENDAHWAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PILAR EKONOMI

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelayan, serta Mendorong Inovasi

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status	SKPD Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.																	
9.1	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	PENGELUARAN PELAYARAN	DUP	Tahunan	0	0	0	0	0	0	Peringkat pertama di provinsi	Tingkat pertumbuhan industri					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
9.1	9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak	2.13.05 PROGRAM PEMBRODAVAAN LEMBAGA KEMASABAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMD Kab. HST	Orang	228799	228799	230173	230479	232133	233526			228799	230173			
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan daya kait proporsinya di negara kurang berkembang.																		
9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	5.01.03 PROGRAM KOOBNASIS DAN SINGONASIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	mentur lapangan usaha 2019-2023 (RPS)	persentase	2	2	2	2	2	4,46	0,57	Tercapai	Peringkat pertama di provinsi				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9.5	9.5.2*	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perkapita, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bapetihbangda	peneliti	2	2	4	6	8	10	2	2	Tercapai	Membantu/ akan tercapai			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PILAR EKONOMI

10 BERKURANGNYA KESENIANGAN Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarregara

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status					SKPD Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10,1		Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,29	0,296	0,228	0,228	0,222	0,22	0,228	0,225							Tercapai	Tercapai				DINAS PERDAGANGAN
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	RPJMD 2021-2026	Indeks	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23							Tercapai	Tercapai				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2026	Indeks	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23							Tercapai	Tercapai			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 2026 JAMINAN SOSIAL	Indeks	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23							Tercapai	Tercapai			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.																							
10.2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PPPA JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial PPKB	Persen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04							Tercapai	Tercapai			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																							
10.3	10.3.1(a)	Indeks Kebebasan	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BPS	Poin	70,13	75	80	81	82	83	80,7	81,4							Tercapai	Tercapai			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.3	10.3.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Portal layanan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	100							Tercapai	Tercapai			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PILAR LINGKUNGAN HIDUP

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN Menjelaskan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status					SKPD Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.																							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPRD	Orang	0	0	0	0	0	0	14714	20554	5062	0	0	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.																							
11.6.1(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	2.11.11 PROGRAM PENGELUARAN PERSAMPAHAN	Kemen LHK	%	52,63	52,63	54,24	55,84	57,41	58,97	93,33	99,74				Tercapai	Tercapai				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			
11.6.2(b)	Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kemen LHK	poln	89,76	89,76	89,84	89,88	90,24	90,35	90,51	93,46				Tercapai	Tercapai				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.																							
11.a.1(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTW yang sudah dilengkapi KHS	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHP	%	100	100	100	100	100	100	100	100				Tercapai	Tercapai				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			

PILAR LINGKUNGAN HIDUP

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB Menjalin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status						SKPD Pelaksana			
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026							
12.1	12.1.1*	Melektaskan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	2.05.03 PROGRAM DKPP PENINGKATAN Pelaksanaan Sasaran Diversifikasi Pola Konsumsi dan KETAHANAN Pangan MASYARAKAT		Skor PPH Konsumsi	85,3	88,6	91,9	95,2	98,5	98,7	85,7	94,1															DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
12.4	12.4.2*	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolannya	2.11.03 PROGRAM DUHP PENGELOLAAN limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolannya		%	18,18	18,18	45,45	63,64	81,82	100	0	0														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
12.6	12.6.1*	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	2.11.05 PROGRAM DUHP PEMBIMBAMAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Perusahaan	31	31	32	33	34	35	20	20														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
12.8	12.8.1.(a)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	2.11.08 PROGRAM DUHP PENDIDIKAN, Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudyta lingkungan hidup		Sekolah/Lembaga /komunitas	2	2	4	6	8	10	2	22														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
12.b	12.b.1.(a)	Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat mencitrakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.	3.26.02 PROGRAM Disparapar PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		lokasi	2	2	2	3	4	4	2	2														DINAS KEPENDUDAH, OLAAHRAGA, DAN PARIWISATA	

PILAR LINGKUNGAN HIDUP

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status						SKPD Pelaksana		
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026						
13.1	13.1.1*	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPRD	Orang	0	0	0	0	0	0	14714	20554	5062	0	0	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.2	13.2.2*	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kemen LHK	Gg CO2-eq	0	0	0	0	0	0	0	0				Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
13.2	13.2.2(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHP	%	0	0	0	0	0	0	0	0				Perlu perhatian khusus	Perlu perhatian khusus								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
13.3	13.3.1(a)	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan ketahanan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLHP	Sekolah/1.2 lembaga/komunitas	2	4	6	8	10	2	4					Tercapai	Tercapai								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	

PILAR LINGKUNGAN HIDUP

14 EKOSISTEM LAUT/AN Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target						Capaian						Status						SKPD Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14.4		Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan peredaran ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

35. PERDAMAAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH Masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

[illegible]

16.2	16.2.7*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	2.08.03 PROGRAM PEREMPUAN	Dinas Sosial PPRB PPA	Orang	3,42	3,42	0,37	3,42	3,42	3,42	3,42	0,37	Tercapai	Tercapai	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBRIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
16.2	16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 15-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial PPRB PPA	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Tercapai	Tercapai	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBRIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
16.5	16.5.1 (a)	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	6.01.02 PROGRAM PENYELINGKARAN PENGAWASAN	Laporan Evaluasi SPIP Kab. HST oleh BPKP Perwakilan KALSEL	Indeks	2	3	3	3,1	3,2	3,3	2,667	3,02	Membaik/ akan tercapai	Tercapai	INSPEKTORAT
16.6	16.6.1 (a)	Presentase instansi pemerintahan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	6.01.02 PROGRAM PENYELINGKARAN PENGAWASAN	LHP BPK RI Perwakilan KALSEL	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	INSPEKTORAT
16.6	16.6.1 (b)	Presentase instansi pemerintahan dengan skor sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= 8	6.01.02 PROGRAM PENYELINGKARAN PENGAWASAN	Laporan Ikhtisar Evaluasi SAKIP SKPD di Kab. HST	Persen	91,67	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	INSPEKTORAT
16.6	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	persen	91,94	100	100	100	100	100	91,94	86,14	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16.6	16.6.1 (a)	Presentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16.6	16.6.1 (b)	Presentase instansi pemerintah dengan skor sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= 8	4.02.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Inspektorat Kab. HST	Persen	91,67	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
16.7	16.7.1 (b)	Menjamin pengambilan keputusan yang rasional, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	4.02.02 PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	persen	30	30	30	30	30	30	20	20	Membaik/ akan tercapai	Membaik/ akan tercapai	SEKRETARIAT DPRD

16.7	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSMDM	persen	20	20	25	30	30	35									BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16.7	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BPRS	Poin	76,32	75	76	77	78	79	81,01	76,92	Tercapai	Tercapai					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan.	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BPRS	Poin	70,13	75	80	81	82	83	80,7	81,4	Tercapai	Tercapai					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KPU	%	20	20	20	20	20	20	20	20	13	Tercapai	Tercapai	Membak/ akan tercapai			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.9		Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.																		
16.9	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Renstra Dinas kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2021-2026	orang	6703	6703	6658	6500	6400	6300	6703	6658	Tercapai	Tercapai					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Renstra Dinas kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2021-2026	Orang	4939	4939	5063	4950	4850	4750	4939	5063	Tercapai	Tercapai					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status		SKPD Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
17.1	Memperkuat mobilitasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.																		SKPD Pelaksana
17.1	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPRPD	Persentase	5	0,31	0,32	0,28	0,31	0,31	6,3							BADAN PENGELOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD	persen	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,52						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17.1	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD	persen	17,05	15	15	15	15	15	17,05	15,03						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17.1	17.1.1.(e)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD	persen	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17.1	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPRPD	persen	1,1	1,097	1,104	1,014	1,182	1,237	1,15	1,1	0,74					BADAN PENGELOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.																		
17.17	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPB	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBERHASILAN	Rilis Realisasi	Rupiah	6,4E+10	6,4E+10	6,48E+10	6,88E+10	6,95E+10	7,01E+10	4,92E+10	5,78E+10	6,88E+10					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
17.17	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang diawakan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB).	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBERHASILAN	Rilis Realisasi	Proyek	100	100	150	200	210	210	116	230	200					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang																		

